

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hak kesehatan seksual dan reproduksi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar, namun masih terdapat banyak permasalahan yang menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi perempuan dan remaja. Angka kematian ibu yang tinggi, belum adanya layanan optimal yang ramah remaja yang tersedia, serta praktik pelukaan dan pemotongan genital perempuan (P2GP) yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan perlunya intervensi kebijakan dan edukasi yang lebih baik. United Nations Populations Fund (UNFPA), sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu populasi dan kesehatan reproduksi, telah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, salah satunya adalah program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* (BERANI) yang berlangsung dari tahun 2018-2023. Program ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan di Indonesia.

UNFPA berperan sebagai mitra teknis dan strategis yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Implementasi UNFPA dalam program BERANI dilakukan dengan pendekatan manajerial dengan pilar utama yaitu monitoring, capacity building dan problem solving. Melalui monitoring, UNFPA memastikan efektivitas program dengan mengumpulkan data dan melakukan evaluasi berkala. Capacity building dilakukan dengan

meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya tenaga kebidanan, melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan modul pendidikan. Selain itu, dengan mendirikan pusat pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah terhadap remaja di beberapa wilayah yang disebut dengan UNALA. Sementara itu, problem solving dilakukan dengan membantu pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi praktis.

Implementasi UNFPA dengan pendekatan normatif melalui program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* (BERANI), yaitu dengan menyusun dan mendukung mitra lokal dalam membuat advokasi dan kebijakan berbasis hak asasi manusia dan sesuai dengan standar dan norma internasional lainnya. Melalui pendekatan normatif yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, UNFPA tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi atau insentif tetapi juga pada legitimasi moral dan otoritas keilmuan untuk mempengaruhi kebijakan nasional di Indonesia. Kolaborasi UNFPA dengan kementerian dan organisasi pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang dilakukan melalui BERANI dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan hal tersebut memperkuat legitimasi UNFPA. Salah satu fokus utama UNFPA melalui program BERANI adalah penghapusan praktik pelukaan/pemotongan genitalia perempuan (P2GP), yang dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kegiatan seminar, pelatihan dan pengembangan panduan advokasi, UNFPA berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya P2GP dan mengubah persepsi masyarakat terkait praktik berbahaya tersebut. Hasil akhir dari upaya advokasi penghapusan P2GP telah

memberikan kekuatan moral dan politik untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari praktik berbahaya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif dapat menjadi alat strategis dalam mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian ini, peneliti memberikan saran agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan mengenai implementasi organisasi internasional lain selain UNFPA dalam pelaksanaan program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* (BERANI) Phase I dan di Phase II. Hal ini penting untuk memperluas pemahaman mengenai kontribusi berbagai organisasi internasional dalam mendukung keberhasilan program BERANI yang telah dilaksanakan sebelumnya.